

KATALOG BPS : 4101002.3301

STATISTIK

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN CILACAP

2016

<https://cilacapkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP**

**STATISTIK
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN CILACAP
2016**

<https://cilacapkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP**

STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN CILACAP 2016

ISBN : -
Katalog : 4101002.3301
No. Publikasi : 33012.1701
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : 42 + xii

Naskah :

Seksi Statistik Sosial

Penyunting :

Seksi Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik

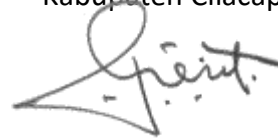
KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Cilacap 2016 menyajikan gambaran kesejahteraan rakyat yang ada di Kabupaten Cilacap,

Data yang disajikan dalam publikasi ini, antara lain memuat informasi tentang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pengeluaran dan konsumsi penduduk. Data yang disajikan bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2015 dan 2016

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak atas perhatian dan dukungannya dalam membantu penyusunan publikasi ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengguna data.

Cilacap, November 2017
Kepala BPS
Kabupaten Cilacap



Toto Desanto, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR ISTILAH TEKNIS.....	x
BAB I KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.....	3
1.1 Kondisi Wilayah.....	3
1.2 Jumlah Penduduk.....	3
1.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	5
1.4 Rasio Jenis Kelamin.....	5
1.5 Struktur Umur.....	6
1.6 Rasio Ketergantungan.....	6
1.7 Fertilitas, Umur Perkawinan Pertama dan Keluarga Berencana.....	7
BAB II KESEHATAN.....	13
2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat.....	13
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan.....	14
2.3 Penggunaan Jaminan Kesehatan.....	17
2.4 Penolong Proses Kelahiran.....	18
BAB III PENDIDIKAN.....	23
3.1 Tingkat Pendidikan.....	24
3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	25
3.3 Angka Partisipasi Murni (APM).....	25
3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK).....	26

BAB IV	PERUMAHAN.....	31
4.1	Kualitas Rumah Tempat Tinggal.....	31
4.2	Penguasaan Tempat Tinggal.....	32
4.3	Fasilitas Perumahan.....	32
4.4	Penguasaan Alat Komunikasi.....	34
BAB V	PENGELUARAN DAN KONSUMSI PENDUDUK.....	39
5.1	Kualitas Rumah Tempat Tinggal.....	39

<https://cilacapkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2016.....	4
Tabel 1.2	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016.....	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016.....	7
Tabel 1.4	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Alat KB yang Digunakan, Cilacap 2015-2016.....	10
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Rata-rata Lama Terganggu menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap 2015-2016.....	14
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Berobat Jalan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap 2015-2016.....	14
Table 2.3	Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016.....	16
Tabel 2.4	Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2106.....	17
Tabel 2.5	Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016.....	18
Tabel 2.6	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Kelahiran Anak Terakhir di Kabupaten Cilacap,2016.....	19
Tabel 3.1	Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) dan Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) Penduduk Berusia 15 ke Atas (dalam tahun) di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016.....	24

Tabel 3.2	Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di KABUPATEN Cilacap Tahun 2015-2016.....	24
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016.....	25
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016.....	26
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016.....	27
Tabel 4.1	Persentase Rata-rata Luas Lantai Cilacap, 2015-2016.....	31
Tabel 4.2	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, Cilacap 2015-2016.....	32
Tabel 4.3	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2016.....	33
Tabel 4.4	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016.....	33
Tabel 4.5	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016.....	34
Tabel 4.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon dan Komputer Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016.....	35
Tabel 5.1	Pengeluaran per Kapita per bulan (dalam Rupiah) di Kabupaten Cilacap,2015-2016.....	39
Tabel 5.2	Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016	40

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Rata-rata Umur Perkawinan Pertama, Cilacap, 2016...	8
Gambar 1.2 Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut status KB, Cilacap , 2016.....	9

<https://cilacapkab.bps.go.id>

DAFTAR ISTILAH TEKNIS

KEPENDUDUKAN

1. **Kepadatan Penduduk**
Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut.
2. **Rasio Jenis Kelamin**
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100.
3. **Rasio ketergantungan**
Perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun/anak-anak dan 65 tahun ke atas/lansia) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dikalikan 100.
4. **Kontrasepsi**
Alat/cara KB yang bersifat permanen/tetap, meliputi : MOW, MOP, AKDR/IUD dan Susuk/Implant

PENDIDIKAN

1. **APS (Angka Partisipasi Sekolah)**
Proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.
2. **APM (Angka Partisipasi Murni)**
Proporsi jumlah anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan.
3. **APK (Angka Partisipasi Kasar)**
Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

4. Rata-rata Lama Sekolah

Jumlah Tahun belajar penduduk umur 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angkanya maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

PERUMAHAN

1. Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari sebatas atap.

2. Dinding Rumah

Sisi Luar/batas dari suatu bangunan /penyekat dengan bangunan fisik lain.

3. Atap Rumah

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya.

4. Atap Layak

Jenis atap yang digunakan antara lain beton, genteng, sirap, seng dan asbes.

5. Fasilitas Air Mium

Instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau Non PAM/PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa

6. Fasilitas Buang Air Besar

Kemudahan suatu rumah tangga dalam menggunakan jamban



**BAB I
KEPENDUDUKAN
DAN
KELUARGA BERENCANA**

<https://cilacaprob.bps.go.id>

BAB I

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.1 Kondisi Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Cilacap tercatat 225.361 Ha (termasuk Pulau Nusakambangan seluas 11.511 Ha). Secara geografis terletak diantara $108^{\circ} 4' 30''$ - $109^{\circ} 30' 30''$ Garis Bujur Timur dan $7^{\circ} 30' - 7^{\circ} 45' 20''$ Garis Lintang Selatan. Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.

Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 Kecamatan, 269 desa dan 15 kelurahan. Luas yang ada terdiri dari 63.963 hektar (29,91 persen) lahan sawah, 146.269 hektar (68,40 persen) bukan lahan sawah dan 3.618 hektar (1,69 persen) lahan lainnya.

1.2 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar dalam suatu pembangunan. Akan tetapi jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat memicu permasalahan mengenai penyediaan sandang, pangan dan papan. Permasalahan tersebut dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya. Penyediaan pangan yang tidak tercukupi akan menimbulkan terjadinya kelaparan. Selain itu ketersediaan permukiman yang tidak mencukupi akan menimbulkan permukiman kumuh, liar dan tidak layak.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera di tangani oleh pemerintah. Kebijakan pembangunan dan kependudukan yang dilakukan pemerintah perlu didukung oleh sistem informasi kependudukan yang handal, sehingga upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap menurut hasil registrasi penduduk akhir pada tahun 2016 sebesar 1 785 971 jiwa yang terdiri dari laki-laki 895 201 jiwa dan perempuan

890 770 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,31 persen.

Tabel 1.1
Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Cilacap 2016

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan	
1. Dayeuhluhur	185,06	24 711	25 119	49 830	269
2. Wanareja	189,73	49 101	49 638	98 739	520
3. Majenang	138,56	64 312	64 544	128 856	930
4. Cimanggu	167,44	48 740	48 382	97 122	580
5. Karangpucung	115,00	36 608	37 350	73 958	643
6. Cipari	121,47	31 614	31 558	63 172	520
7. Sidareja	54,95	28 588	29 116	57 704	1 050
8. Kedungreja	71,43	40 822	40 523	81 345	1 139
9. Patimuan	75,30	23 167	23 311	46 478	619
10. Gandrungmangu	143,19	53 098	53 092	106 190	742
11. Bantarsari	95,54	35 346	34 624	69 970	732
12. Kawunganten	117,43	40 063	41 372	81 435	693
13. Kampung Laut	146,14	8 849	8 414	17 263	118
14. Jeruklegi	96,80	33 731	32 740	66 471	687
15. Kesugihan	82,31	49 248	48 656	97 904	1 189
16. Adipala	61,19	39 605	39 420	79 025	1 291
17. Maos	28,05	24 721	24 266	48 987	1 746
18. Sampang	27,30	19 014	18 802	37 816	1 385
19. Kroya	58,83	52 274	52 374	104 648	1 779
20. Binangun	51,43	33 770	32 900	66 670	1 297
21. Nusawungu	61,26	39 391	38 787	78 178	1 276
22. Cilacap Selatan	9,11	37 715	38 982	78 697	8 639
23. Cilacap Tengah	22,15	42 337	42 104	84 441	3 812
24. Clacap Utara	18,84	36 376	34 696	71 072	3 772
Cilacap	2138,50	895 201	890 770	1 785 971	835

Sumber : Registrasi penduduk

1.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk yang tidak merata akan mengakibatkan perbedaan tingkat kepadatan penduduk. Berdasarkan tabel 1.1 kecamatan yang jumlah penduduknya paling banyak adalah Kecamatan Majenang yaitu sebesar 128 856 jiwa (7,21 persen), diikuti Kecamatan Gandrungmangu sebesar 106 190 jiwa (5,95 persen) kemudian Kecamatan Kroya sebesar 104 648 jiwa (5,86 persen). Sedangkan yang penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Kampung Laut yaitu sebesar 17 263 jiwa (0,97 persen).

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan luas wilayahnya yang dihitung dalam satuan jiwa km persegi. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak sedangkan lahan dan luas wilayahnya tidaklah bertambah. Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat yaitu 833 jiwa/km² pada tahun 2015 menjadi 835 jiwa/ km² pada tahun 2016. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Cilacap Selatan (8 639 jiwa/km²) diikuti Kecamatan Cilacap Tengah (3 812 jiwa/km²) dan Kecamatan Cilacap Utara (3 772 jiwa/km²), sementara itu kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kampung Laut (118 jiwa/ km²).

1.4 Rasio Jenis Kelamin

Besar kecilnya rasio jenis kelamin di suatu daerah dipengaruhi oleh :

a. Sex Ratio at Birth.

Kelahiran bayi laki-laki lebih banyak daripada bayi perempuan.

b. Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

Jika kematian laki-laki lebih besar daripada jumlah kematian perempuan maka rasio jenis kelamin semakin kecil.

c. Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

Jika suatu daerah sex rasio > 100 maka di daerah tersebut lebih banyak penduduk laki-laki. Jika sex rasio < 100 berarti lebih banyak penduduk perempuan.

Berdasarkan jenis kelamin di tahun 2016, jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih

banyak dibanding penduduk perempuan, yang diindikasikan dengan angka sex ratio sebesar 100,5.

1.5 Struktur Umur

Struktur umur penduduk Kabupaten Cilacap mengalami transisi menuju ke penduduk tua. Struktur tersebut ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) dan semakin bertambahnya penduduk pada kelompok usia dewasa (15-64 tahun) serta kelompok usia tua (65 tahun ke atas).

Dari tabel 1.2 Terlihat distribusi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa 26,08 persen penduduk Kabupaten Cilacap berusia muda, 66,12 persen berusia produktif dan 7,79 persen berusia tua.

Tabel 1.2
Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016

Kelompok Umur	2015	2016
(1)	(2)	(3)
0 – 14	26,08	25,76
15 - 64	66,12	66,23
65 +	7,79	8,00

Sumber : Registrasi penduduk

1.6 Rasio Ketergantungan

Perubahan struktur penduduk menurut umur mempengaruhi besarnya angka rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-4 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Dari tabel 1.3 Dapat diketahui bahwa angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2015 sebesar 50,98 persen, yang berarti tiap 100 orang usia produktif harus menanggung 50 orang usia non produktif.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016

Kelompok Umur	2015	2016
(1)	(2)	(3)
0 – 14	464 539	460 057
15 - 64	1 177 203	1 182 891
65 +	138 791	143 023
Rasio Ketergantungan	51,25	50,98

Sumber : Registrasi penduduk

1.7 Fertilitas, Umur Perkawinan Pertama dan Keluarga Berencana

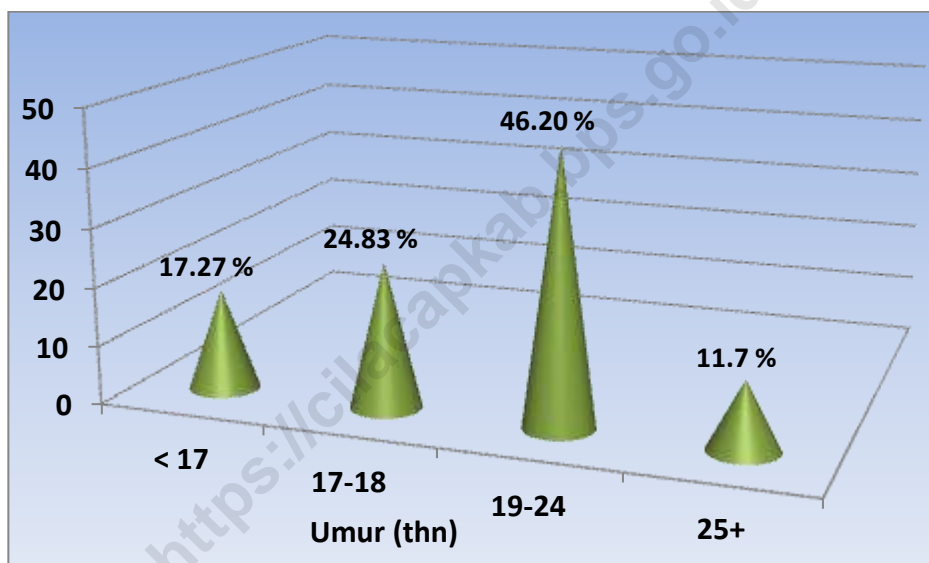
Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tidak terkendali akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga beban Negara akan semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Tingginya angka kelahiran tersebut sangat erat kaitannya dengan usia perkawinan pertama. Usia perkawinan pertama sebagai umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Gambar 1.1 menunjukkan, pada tahun 2016 sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada umur 19-24 tahun sebesar 46,20 persen. Wanita yang melakukan perkawinan pertama pada umur 17-18 tahun sebesar 24,83 persen dan yang menikah pertama kali pada umur 25 tahun ke atas sebanyak 11,7 persen. Sementara itu, wanita yang kawin pada umur kurang dari 17 tahun mencapai 17,27 persen.

Gambar 1.1
Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin
Menurut Rata-rata Umur Perkawinan Pertama
Cilacap 2016



Sumber : Susenas 2016

Selain melalui penundaan umur perkawinan pertama, program Keluarga Berencana (KB) masih dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang saat ini sangat sulit untuk dikendalikan. Melalui Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), diharapkan dapat membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran. Untuk itu masyarakat diharapkan dapat berperan aktif mengikuti program ini dengan ber-KB melalui penggunaan alat kontrasepsi.

Jika dilihat di gambar 1.2, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sebanyak 51,72 persen. Sedangkan wanita umur 15-49 tahun yang pernah menggunakan alat/cara KB dan sekarang sudah tidak

menggunakan lagi sebanyak 14,46 persen dan wanita umur 15-49 tahun yang tidak pernah menggunakan alat/cara KB sebanyak 33,82 persen.

Gambar 1.2
Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin
menurut Status KB
Cilacap,2016



Sumber : Susenas 2016

Pada tabel 1.4 dapat dilihat cara penggunaan alat/cara KB yang paling banyak digunakan adalah Suntik KB (54,30 persen), Pil KB (18,34 persen), AKDR/IUD/Spiral (11,08 persen) dan Susuk KB (8,78 persen). Penggunaan alat kontrasepsi yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya adalah Suntikan KB yang meningkat dari 51,16 persen pada tahun 2015 menjadi 54,30 persen pada tahun 2016. Kemudian Susuk KB sebanyak 7,32 persen pada tahun 2015 menjadi 8,78 persen pada tahun 2016. Sementara itu yang menggunakan Pil KB mengalami penurunan dari 21,47 persen pada tahun 2015 menjadi 18,34 persen pada tahun 2016. Demikian juga dengan penggunaan Kontapl sebanyak 4,65 persen di tahun 2015 turun menjadi 4,60 persen di tahun 2016.

Tabel 1.4
Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin
menurut Alat KB yang Digunakan
Cilacap, 2015-2016

Cara/ Alat KB	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Kontap	4,65	4,60
AKDR/IUD/Spiral	9,98	11,08
Suntikan KB	51,16	54,30
Susuk KB	7,32	8,78
Pil KB	21,47	18,34
Kondom dll	5,15	2,90
Total	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015,2016



BAB II
KESEHATAN

<https://cilacangkabo.bps.go.id>

BAB II

KESEHATAN

Kesehatan merupakan aspek dasar yang dibutuhkan oleh semua orang. Dengan kondisi sehat setiap orang dapat melakukan semua aktivitasnya untuk mencapai apa yang diinginkan. Tubuh yang sehat secara fisik memungkinkan seseorang untuk melakukan segala kegiatan sehingga mencapai hasil yang optimal dan mampu menjadi manusia berkualitas.

Setiap tahap pembangunan bidang kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah tujuan utamanya adalah mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Melalui pembangunan bidang kesehatan diharapkan dapat terwujud derajat kesehatan penduduk yang setinggi-tingginya sebagai bagian dari indikator kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan penduduk setinggi-tingginya, tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan misalnya melalui penyediaan berbagai fasilitas kesehatan dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai beserta tenaga medis berkualitas. Selain itu juga penduduk dapat berupaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan penduduk untuk hidup sehat dalam lingkungan yang sehat pula.

2.1 Derajat Kesehatan

Untuk mengukur tingkat kesehatan penduduk dapat terlihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Gangguan kesehatan dapat mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari seperti melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Semakin banyak penduduk mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat keluhan kesehatan penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2016 menunjukkan 36,43 persen. Persentase ini meningkat jika dibandingkan dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di tahun 2015 sebesar 30,49 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang

mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibanding penduduk perempuan, yaitu masing-masing sebesar 36,62 persen dan 36,43 persen.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan kesehatan dan Rata-rata Lama Terganggu menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap, 2015-2016

Rincian	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Keluhan Kesehatan (%)	30,07	36,62	30,91	36,43	30,49	36,43

Sumber :Susenas 2015, 2016

2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.2
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Berobat Jalan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Cilacap 2015-2016

Cara Berobat	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berobat Jalan	52,54	50,96	55,16	51,55	53,87	51,26
Tidak berobat jalan	47,46	49,04	44,84	48,45	46,13	48,74

Sumber :Susenas 2015, 2016

Tubuh yang sehat merupakan keinginan semua orang baik yang tua maupun yang muda, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat seperti olahraga yang teratur, makanan yang bergizi maupun memeriksakan kesehatan secara rutin ke petugas kesehatan. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi

masyarakat, diharapkan akan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai maka masyarakat akan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan. Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Tabel 2.2 menyajikan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan . Penduduk yang berobat jalan sebanyak 51,26 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan yang berobat jalan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yang berobat jalan, yaitu masing-masing 51,55 persen penduduk perempuan dan 50,96 persen penduduk laki-laki.

Jika dilihat pada tabel 2.2 masih ada 48,74 persen penduduk yang tidak berobat jalan. Ada beberapa cara pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat selain berobat jalan, yaitu mengobati sendiri atau merasa tidak perlu diobati. Untuk itu perlu diketahui alasan apa yang menjadi penyebab masyarakat tidak melakukan berobat jalan. Dari informasi tersebut diharapkan dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Dari tabel 2.3, penduduk yang tidak berobat jalan sebagian besar memilih untuk mengobati sendiri sebesar 75,84 persen. Penduduk yang merasa tidak perlu berobat sebesar 18,23 persen. Ada juga penduduk yang tidak berobat jalan karena tidak punya biaya berobat sebesar 1,03 persen dan alasan lainnya sebesar 2,75 persen. Sementara ada yang tidak berobat jalan dengan alasan tidak ada yang mendampingi sebesar 0,43 persen. Penduduk yang mengobati sendiri meningkat dari 60,38 persen pada tahun 2015 menjadi 75,84 persen pada tahun 2016. Demikian juga yang tidak ada biaya transport naik menjadi 1,72 persen.

Tabel 2.3
Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan
Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan
Di Kabupaten Cilacap tahun 2015-2016

Alasan Tidak Berobat Jalan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Tidak punya biaya berobat	1,64	1,03
Tidak ada biaya transport	0,00	1,72
Tidak ada sarana transportasi	0,00	0,00
Waktu tunggu pelayanan lama	0,00	0,00
Mengobati sendiri	60,38	75,84
Tidak ada yang mendampingi	0,58	0,43
Merasa tidak perlu	36,14	18,23
Lainnya	1,26	2,75
Total	100,00	100,00

Sumber :Susenas 2015-2016

Tabel 2.4 adalah persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat/cara berobat. Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan ke praktek dokter/bidan sebesar 51,22 persen. Sebanyak 22,85 persen penduduk yang berobat jalan ke puskesmas/pustu.

Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat/cara berobatnya yang mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 adalah RS Pemerintah yaitu pada tahun 2015 sebesar 5,04 persen menjadi 4,85 persen pada tahun 2016. Kemudian yang berobat ke RS Swasta juga menurun, yaitu 6,27 persen pada tahun 2015 menjadi 3,61 persen pada tahun 2016. Persentase penduduk yang berobat ke Puskesmas/pustu meningkat dari 22,30 persen di tahun 2015 menjadi 22,85 persen di tahun 2016. Penduduk yang berobat ke Klinik/Praktekj Dokter Bersama meningkat dari 8,06 persen menjadi 11,89 persen di tahun 2016. Hal ini disebabkan makin beragamnya jaminan

kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik .

Tabel 2.4
Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan
menurut Tempat/Cara Berobat dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cilacap, 2015-2016

Tempat/Cara Berobat	2015	2016
(1)	(6)	(7)
RS Pemerintah	5,04	4,85
RS Swasta	6,27	3,61
Praktek Dokter/Bidan	55,53	51,22
Klinik/praktek dokter bersama	8,06	11,89
Puskesmas/Pustu	22,30	22,85
UKBM	4,36	3,58
Pengobatan tradisional/alternatif	2,68	1,24
Lainnya	1,86	2,85

Sumber :Susenas 2015, 2016
UKBM (Poskesdes,Polindes,Posyandu,Balai pengobatan)

2.3 Penggunaan Jaminan Kesehatan

Pemerintahan berupaya menyediakan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Pada Tabel 2.5 yang mempunyai BPJS Kesehatan meningkat dari 7,80 persen pada tahun 2015 menjadi 10,35 persen. BPJS Ketenagakerjaan juga meningkat dari 2,14 persen di tahun 2015 menjadi 3,33 persen di tahun 2016.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki
Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap 2015-2016

Jaminan Kesehatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
BPJS Kesehatan	7,80	10,35
BPJS Ketenagakerjaan	2,14	3,33
Askes/Asabri/Jamsostek	3,26	4,57
Jamkesmas/PBI	34,71	27,16
Jamkesda	1,75	0,49
Asuransi Swasta	0,38	0,43
Perusahaan/Kantor	1,11	0,80
Tidak memiliki	49,54	53,62

Sumber :Susenas 2015,2016

Dari tabel 2.5 dapat dilihat bahwa jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki masyarakat adalah Jamkesmas/PBI (27,16 persen), BPJS Kesehatan (10,35 persen), Askes/Asabri/Jamsostek (4,57 persen), BPJS Ketenagakerjaan (3,33 persen). Sementara yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebesar 53,62 persen.

2.4 Penolong Proses Kelahiran

Begitu pentingnya peran kesehatan dalam kehidupan sehingga diperlukan perhatian untuk mengoptimalkan sejak dini, yaitu sejak bayi masih dalam kandungan sampai orang tua, serta harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pemberian gizi yang cukup serta perilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat pula sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan pada masa balita, karena pada rentang usia tersebut, anak sangat rentan dalam masalah kesehatan dan kekurangan gizi.

Beberapa indikator kesehatan balita yang dikumpulkan dalam Susenas antara lain penolong kelahiran serta pemberian ASI dan imunisasi. faktor penolong persalinan sangat


mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi pada saat proses persalinan. Kekeliruan penanganan baik pada saat melahirkan maupun pasca kelahiran akan berakibat fatal bagi kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga berpengalaman yang sudah dibekali dengan pengetahuan serta kemampuan kebidanan akan membantu kelancaran proses persalinan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter, bidan dan tenaga medis lainnya dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun bersalin, keluarga atau lainnya.

Tabel 2.6
Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun
yang Pernah Kawin menurut Penolong Kelahiran Anak Terakhir
di Kabupaten Cilacap, 2016

Penolong Kelahiran Anak Terakhir	2015	2016
(1)	(2)	
Dokter	26,18	36,11
Bidan	73,82	58,97
Tenaga Medis Lain	0,00	1,79
Dukun Bersalin	0,00	3,13
Keluarga	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Total	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015,2016

Tabel 2.6 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut penolong kelahiran anak terakhir yang terbesar pada bidan yaitu sebesar 58,97 persen, walaupun turun dari 73,82 persen di tahun 2015. Sedangkan penolong kelahiran di dokter meningkat dari 26,18 persen pada tahun 2015 menjadi 36,11 pada tahun 2016.



BAB III
PENDIDIKAN

<https://cilacapkab.pps.go.id>

BAB III

PENDIDIKAN

Mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan ukuran pemerataan atas hasil pembangunan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Usaha peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan pembangunan sarana prasarana sekolah yang memadai, ditunjang dengan program bantuan biaya sekolah dan berbagai macam beasiswa. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah dapat mengindikasikan sampai sejauhmana tingkat pendidikan yang dijalani oleh seseorang. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling/MYS*) didefinisikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Berdasarkan tabel 3.1 Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2016 mencapai 6,90 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai kelas 1 SMP (kelas VII), yaitu baru mencapai jenjang tamat Sekolah Dasar.

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat adalah harapan lama sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*), yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa angka harapan lama sekolah di Kabupaten Cilacap tahun 2016 sebesar 12,29, artinya seorang anak yang dilahirkan di tahun 2016 diharapkan dapat menempuh pendidikan selama 12 tahun atau setara Sekolah Menengah Uum/Sederajat.

Tabel 3.1
Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*) dan Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*) Penduduk Berusia 15 ke Atas (dalam tahun) di Kabupaten Cilacap tahun 2015– 2016

Tahun	MYS	EYS
(1)	(2)	(3)
2015	6,58	12,28
2016	6,90	12,29

Sumber :Susen

3.1 Tingkat Pendidikan

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak/belum tamat Sekolah Dasar sebesar 24,99 persen. Penduduk yang menamatkan pendidikan sampai Sekolah Dasar sebesar 33,83 persen, menamatkan pendidikan sampai SLTP sederajat sebesar 16,44 persen dan yang menamatkan pendidikan sampai SLTA sederajat sebesar 19,17 persen. Sementara penduduk yang mampu menamatkan pendidikannya hingga jenjang perguruan tinggi masih rendah yaitu 3,70 persen.

Tabel 3.2
Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Cilacap Tahun 2015 – 2016

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
1. Tidak/Belum pernah Sekolah	5,95	1,87
2. Tidak/Belum Tamat SD	23,18	24,99
3. Tamat SD/Sederajat	33,51	33,83
4. Tamat SLTP/Sederajat	21,10	16,44
5. Tamat SLTA/Sederajat	12,46	19,17
6. Tamat PT	3,81	3,70
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015,2016

3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan berbagai jenjang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikan.

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap Tahun 2015 – 2016

Kelompok Umur	2015			2016		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 – 12	98,91	99,69	99,28	100,00	99,58	99,80
13 – 15	96,25	95,63	95,96	97,11	97,97	97,55
16 – 18	63,78	65,63	64,63	78,57	70,03	74,71

Sumber : Susenas 2015,2016

Berdasarkan tabel 3.3 penduduk umur 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada tahun 2015 sebanyak 99,80 persen. Penduduk umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 97,55 persen dan penduduk yang berumur 16-18 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 74,71 persen. Selama kurun waktu 2015-2016, semua kelompok umur mengalami peningkatan yaitu di kelompok umur 7-12 tahun dari 99,28 persen di tahun 2015 menjadi 99,80 persen di tahun 2016. Di kelompok umur 13-15 tahun meningkat dari 95,96 persen menjadi 97,55 persen di tahun 2016 dan kelompok umur 16-18 tahun dari 64,63 persen di tahun 2015 menjadi 74,71 persen di tahun 2016.

3.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS, indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah persentase jumlah anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai

dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi APM berarti banyak anak pada kelompok tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Tabel 3.4
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015 – 2016

Jenjang Pendidikan	2015			2016		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	91,99	99,69	95,66	98,86	99,58	99,19
SMP/MTs	85,47	83,17	84,38	81,33	85,34	83,42
SMA/MA	49,62	59,89	54,32	66,25	67,73	66,92

Sumber : Susenas 2015,2016

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 penduduk umur 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD/MI sebesar 99,19 persen. Penduduk umur 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS sebesar 83,42 persen dan penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah di SMA/MA sebesar 66,92 persen.

3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun umurnya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar bisa lebih dari 100 persen, Hal ini disebabkan adanya siswa dengan umur lebih tua dibanding umur standar di jenjang pendidikan tertentu seperti kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di umur yang lebih muda.

Tabel 3.1 menunjukkan APK SD/MI tahun 2016 sebesar 108,51 persen. Sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 91,28 persen dan untuk SMA/MA sebesar 80,22 persen. Jika dibandingkan tahun 2015, hanya APK untuk SMA/MA yang mengalami peningkatan dari 75,20 persen di tahun 2015 menjadi 80,22 persen di tahun 2016. APK untuk SD/MI mengalami penurunan dari 109,09 persen di tahun 2015 menjadi 108,51 persen di tahun

2016. APK untuk SMP/MTs mengalami penurunan dari 99,63 persen menjadi 91,28 persen.

Tabel 3.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015– 2016

Jenjang	2015			2016		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	107,95	110,33	109,09	108,58	108,43	108,51
SMP/MTs	111,25	86,64	99,63	96,35	86,59	91,28
SMA/MA	62,18	90,59	75,20	80,09	80,37	80,22

Sumber : Susenas 2015,2016



BAB IV
PERUMAHAN

<https://cilacapkab.bps.go.id>

BAB IV PERUMAHAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia selain kebutuhan sandang dan pangan. Di dalam rumah, manusia dididik mengenal lingkungannya, sehingga berkembang menjadi manusia yang berkepribadian. Dalam kehidupan bermasyarakat, tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar sebagai bagian dari kualitas kehidupan dan kesejahteraan manusia. Sebagai tempat untuk saling berinteraksi antar anggota keluarga, rumah memiliki fungsi yang sangat luas, bukan sekedar sebagai tempat berlindung, melainkan juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan, kenyamanan dan estetika.

4.1 Kualitas Rumah Tempat Tinggal

Luas lantai yang dimaksud disini adalah aluas lantai yang biasanya ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Luas lantai mencerminkan tingkat status sosial penghuninya. Semakin tinggi luas lantai yang dikuasai semakin tinggi status sosial rumah tangga .

Tabel 4.1
Persentase Rata-rata Luas Lantai
Cilacap, 2015-2016

Luas Lantai (m ²)	Persentase Luas Lantai	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
<20	1,07	0,72
20-49	19,57	19,04
50-99	64,38	68,21
100-149	11,27	10,41
150+	3,74	1,62
Total	100	100

Sumber : Susenas 2015,2016

Tabel 4.1 menggambarkan luas lantai rumah (dalam meter persegi) yang ditempati rumah tangga . Pada tahun 2016 banyaknya rumah tangga yang menempati luas lantai kurang dari 50 m² sebesar 19,76 persen. Yang menempati luas lantai antara 50-99 m² sebesar 68,21 persen. Yang menempati luas lantai diatas 100 m² sebesar 12,03

4.2 Penguasaan Tempat Tinggal

Status penguasaan tempat tinggal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Tabel 4.2
Persentase Rumah Tangga menurut
Status Penguasaan Tempat Tinggal
Cilacap, 2015-2016

Status Penguasaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	94,42	93,22
Kontrak/Sewa	2,06	1,39
Bebas Sewa	3,03	4,72
Dinas	0,38	0,67
Lainnya	0,11	0,00
Total	100	100

Sumber : Susenas 2015,2016

Di Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang menempati rumah sendiri sebesar 93,22 persen. Rumah tangga yang kontrak/sewa tempat tinggal sebesar 1,39 persen dan yang menempati rumah bebas sewa sebesar 4,72 persen.

4.3 Fasilitas Perumahan

Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang lengkap menentukan kualitas dan kenyamanan tempat tinggal. Fasilitas tempat tinggal seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik.

Tabel 4.3
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2016

Sumber Penerangan	2016
(1)	(2)
Listrik PLN	98,81
Listrik Non PLN	0,99
Bukan Listrik	0,20

Sumber : Susenas 2016

Pada tabel 4.3 terlihat rumah tangga yang penerangan tempat tinggal memakai listrik PLN sebesar 98,81 persen. Yang menggunakan listrik Non PLN sebesar 0,99 persen, dan yang belum menggunakan listrik sebesar 0,20 persen.

Tabel 4.4
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2016

Sumber Air Minum	2016
(1)	(2)
Air dalam Kemasan	20,76
Leding	9,94
Pompa	12,31
Sumur	43,36
Mata Air	7,63
Air Permukaan	0,00
Air Hujan dan Lainnya	6,00
Total	100

Sumber : Susenas 2016

Dari tabel 4.4 Persentase Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum terbanyak adalah sumur sebesar 43,36 persen. Diikuti air dalam kemasan sebesar 20,76

persen. Sedangkan yang menggunakan leding sebesar 9,94 persen. Ada juga rumah tangga yang air minumnya menggunakan air hujan dan lainnya yaitu sebesar 6,00 persen.

Tabel 4.5
Persentase Rumah tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016

Tahun	Fasilitas Tempat Buang Air Besar				Total
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	76,20	8,74	0,54	14,52	100,00
2016	79,31	7,66	0,95	12,08	100,00

Sumber :Susenas 2015,2016

Berdasarkan Tabel 4.5 pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 79,31 persen meningkat dari 76,20 persen pada tahun 2015. Rumah tangga yang fasilitas tempat buang air besarnya bersama sebesar 7,66 persen. Sementara rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar menurun dari 14,52 persen pada tahun 2015 menjadi 12,08 persen pada tahun 2016.

4.4 Penguasaan Alat Komunikasi

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kepemilikan komputer semakin pesat pertumbuhan. Kemudian semakin berkembangnya teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan.

Pada tabel 4.6 menunjukkan rumah tangga yang memiliki telepon dan komputer. Dari tahun 2015 sampai tahun 2016, rumah tangga yang memiliki komputer mengalami peningkatan dari 12,23 persen di tahun 2015 menjadi 13,64 persen di tahun 2016. Sedangkan rumah tangga yang memiliki telepon rumah meningkat dari 3,41 persen di tahun 2015 menjadi 3,73 di tahun 2016.

Tabel 4.6
Psentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon dan Komputer
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016

Alat Komunikasi	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Telepon	3,41	3,73
Komputer	12,23	13,64

Sumber : Susenas 2015,2016



BAB V
PENGELUARAN DAN
KONSUMSI PENDUDUK

<https://cilacapbooks.go.id>

BAB V

PENGELUARAN DAN KONSUMSI PENDUDUK

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan dijadikan cermin tingkat pendapatan per kapita sebulan. Dari tabel 5.1, pada tahun 2016 pengeluaran penduduk di Kabupaten Cilacap untuk konsumsi makanan sebesar 363.466 rupiah atau 50,43 persen dari total pengeluaran dan untuk non makanan sebesar 357.251 rupiah atau 49,57persen.

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan.

Tabel 5.1
Pengeluaran per Kapita Per bulan (dalam Rupiah)
Di Kabupaten Cilacap tahun 2015-2016

Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
1. Makanan	(Rp) 333.228	363.466
	(%) 50,06	50,43
2. Bukan Makanan	(Rp) 332.446	357.251
	(%) 49,94	49,57
Jumlah	(Rp) 665.674	720.717
	(%) 100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015,2016

Tabel 5.2
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Cilacap
Tahun 2015-2016 (persen)

Kelompok Komoditas	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Makanan		
1. Padi-padian	18,18	15,53
2. Umbi-Umbian	0,67	0,63
3. Ikan/udang/cumi/kerang	4,65	4,14
4. Daging	3,87	3,68
5. Telur dan Susu	6,57	6,48
6. Sayur-sayuran	7,78	8,90
7. Kacang-Kacangan	3,29	3,32
8. Buah-Buahan	4,20	4,11
9. Minyak dan Lemak	3,46	3,08
10. Bahan Minuman	4,11	4,11
11. Bumbu-Bumbuan	2,17	2,27
12. Konsumsi Lainnya	1,87	1,85
13. Makanan dan Minuman Jadi	24,29	27,74
14. Tembakau dan Sirih	14,90	14,16
Bukan Makanan		
15. Perumahan dan Fasilitas Rumah tangga	46,63	46,27
16. Barang dan Jasa	25,88	26,31
17. Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	5,45	6,15
18. Barang-barang yang Tahan Lama	14,91	12,35
19. Pajak, Pungutan dan Asuransi	3,70	4,50
20. Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	3,43	4,41

Sumber : Susenas 2015,2016

Pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pengeluaran makanan sebesar 15,53 persen digunakan untuk konsumsi padi-padian, kemudian 27,74 persen untuk konsumsi makanan dan minuman jadi. Sedangkan untuk non makanan pengeluaran terbesar untuk komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 46,27 persen, kemudian aneka barang dan jasa sebesar 26,31 persen dari total pengeluaran non makanan.

<https://cilacapkab.bps.go.id>

<https://cilacapkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP

Jl. Dr. Soetomo No.16A, Telp. (0282) 534328

E-mail : bps3301@bps.go.id

Homepage : <http://cilacapkab.bps.go.id>